

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian penarikan retribusi parkir dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Pengendalian preventif

- a. Juru parkir harus menggunakan tanda pengenalan, rompi dan lain-lain saat beraktivitas

Pengendalian dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur terhadap juru parkir dikatakan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, walaupun Dinas Perhubungan sudah melakukan sosialisasi Perda sebagai langkah awal untuk mengatasi terjadinya penyimpangan tetapi tetap saja penyimpangan terjadi. Hal ini terlihat dari masih banyak juru parkir yang melakukan pelayanan dan penarikan retribusi parkir tidak menggunakan perlengkapan.

- b. Juru parkir harus menggunakan karcis, kupon dan kartu langganan saat penarikan retribusi parkir

Dari hasil lapangan pentingnya penggunaan karcis parkir sebagai bukti pembayaran, padahal Dinas Perhubungan sudah melakukan sosialisasi tetapi saja juru parkir masih menyimpang, tidak ada ketegasan juru parkir kepada masyarakat untuk mengambil karcis.

- c. Pemantauan terhadap proses dan laporan hasil kerja juru parkir

Dalam proses pemantauan terhadap juru parkir Dinas Perhubungan sudah melakukan pemantauan regular setiap 3 bulan sekali dan juga pemantauan incidental atau secara tiba-tiba belum berjalan dengan baik karena juru parkir masih tetap melanggar aturan tersebut.

- d. Jumlah uang didapatkan sesuai dengan jumlah karcis yang dijual

Jumlah uang sesuai dengan karcis yang terjual sebagai patokan pembayaran kepada Dinas Perhubungan salah besar, karena jumlah uang yang dipungut oleh juru parkir tidak sesuai dengan karcis yang terjual disebabkan petugas parkir masih mengambil keuntungan dari karcis tersebut.

2. Pengendalian represif

- a. Teguran terhadap juru parkir yang melakukan penyimpang.

Kinerja Dinas Perhubungan dalam memberikan teguran kepada juru parkir yang melakukan pelayanan tidak sesuai perda belum cukup baik. Hal ini terlihat dari perilaku juru parkir dan perlengkapan juru parkir dilapangan yang belum sepenuhnya sesuai perda.

- b. Pembinaan dan penertiban terhadap juru parkir yang melakukan penyimpangan.

Tindakan Dinas Perhubungan terhadap juru parkir belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap mereka yang menyimpang.

B. Saran

Berdasarkan serangkali hasil analisis yang telah penulis lakukan mengenai pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam penarikan retribusi parkir di Kota Larantuka, maka penulis memberikan saran yang dapat dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Larantuka :

1. Pengendalian preventif

A. Juru parkir harus menggunakan tanda pengenalan, rompi dan lain-lain saat beraktivitas

1. Para juru parkir dalam pelayanan harus sesuai dengan peranturan daerah sehingga tidak terlihat seperti menyimpang
2. Dinas perhubungan harus menyiapkan perlengkapan untuk petugas parkir yang belum ada

B. Juru parkir harus menggunakan karcis, kupon dan kartu langganan saat penarikan retribusi parkir

1. Harus adanya ketegasan dari Dinas Perhubungan kepada petugas parkir
2. Petugas parkir harus memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir

C. Pemantauan proses penarikan retribusi parkir

1. Dinas Perhubungan harus lebih tegas dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pelayanan dan penarikan retribusi parkir. Ketegasan sangat diperlukan untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Dengan melakukan operasi pemantauan dan penertiban rutin kepada juru parkir dilapangan, untuk memastikan para juru parkir

melakukan pelayanan dan penarikan jasa retribusi parkir sesuai regulasi yang ada.

2. Petugas dinas Perhubungan harus Memaksimalkan alokasi waktu yang sudah ditetapkan.

D. Jumlah uang didapatkan sesuai dengan jumlah karcis yang dijual

1. Harus adanya ketegasan dari Dinas Perhubungan kepada petugas parkir
2. Petugas parkir harus pungutan retribusi sesuai karcis yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan

2. Pengendalian represif

- a. Teguran terhadap juru parkir yang melakukan penyimpang

Memberi sanksi tegas berupa pembinaan keras kepada juru parkir yang menyimpang agar mereka jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pembinaan keras biasa dilakukan berupa melipat gandakan setoran retribusi parkir dan pemutusan hubungan kerja (PHK)

- b. Pembinaan dan penertiban terhadap juru parkir yang melakukan penyimpangan

Dinas Perhubungan harus membina dan menertib juru parkir yang masih menyimpang agar mereka sadar dan tidak melakukan kesalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Manulang M. 1985 : *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia, Indonesia.
- Nawawi, 1986: *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga.
- Prayudi, Admosudirjo. 1980 : *Administrasi Dan Manajemen Umum*, Ghalia, Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 tahun 2011 Tentang retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Saworto, 1988 : *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia, Jakarta.
- S. P. Hasibun. 2009: *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ketujuh, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Stoner, James A. F. 1996: *Manajemen Jilib II*, Edisi Indonesia, Penerbit PT. Rajagrafindo Utama, Jakarta.
- Siahaan M, 2005: *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Siagian. S. P. 1990: *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung Jakarta.
- Soekarno. K. 1982: *Dasar-Dasar Manajemen*, Graha, Jakarta.
- Sujamto. 1986: *Efektifitas Pengawasan Melekat*, Irjen Depdagri Jakarta.

Terry, George, 2000: *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Edisi Bahasa Indonesia).PT. Bumi Aksara,Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

[Http://Www.Skripsi](http://Www.Skripsi.co.id) Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan PAD.co.id